

THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONERS AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE IN MINING COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE

Yusmaniarti¹, Adelia Oktapriani², Furqonti Ranidiah³, Hesti Setiorini⁴, Marini⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

⁵Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email : yusmaniarti@umb.ac.id, adeliamanna8@gmail.com, furqontiranidiah@umb.ac.id,
hestisetiorini@umb.ac.id, marini@umb.ac.id

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution of citizens in the life of the state as a contribution to national development. However, in practice, there are still cases of tax evasion that are most often carried out by companies. This study aims to determine (1) the effect of institutional ownership on tax avoidance (2) the effect of the Independent Board of Commissioners on tax avoidance and (3) the effect of profitability on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This research is a quantitative research. The sample in this study consisted of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2017-2019 period which found 18 companies using the purposive sampling method. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis test. The result is partially, institutional ownership, independent board of commissioners and profitability have no effect on tax avoidance. So, partially the independent variables in this study have no effect on the dependent variable.

Keywords: *Institutional Ownership, Independent Board Of Commissioners, Profitability, Tax Avoidance*

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib warga Negara dalam kehidupan bernegara sebagai kontribusi dalam pembangunan nasional. Akan tetapi dalam praktiknya, masih ditemukan kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (2) pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan (3) pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel pada penelitian ini terdiri dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 yang berjumlah 18 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji analisis regresi linier berganda. Hasilnya secara parsial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Jadi, secara parsial variabel independen dalam penelitian ini tidak ada memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Kata Kunci : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas, Penghindaran Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Pajak merupakan salah satu penerimaan dan pendapatan Negara yang cukup tinggi. Penerimaan pada sektor ini menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan dan pembelanjaan Negara. Pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Usaha-usaha untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Ariawan & Setiawan, 2017). Setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar iuran pajak kepada Negara, tetapi bagi perusahaan pajak merupakan beban karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Oleh karena itu, hampir sebagian besar perusahaan tidak ada yang sukarela membayar pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila perusahaan tidak membayar pajak akan terkena sanksi dan denda yang dapat merugikan perusahaan. Fenomena itulah yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) agar perusahaan tetap membayar pajak yang akan dibayarkan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan fenomena yang rumit dan unik karena disatu sisi undang-undang memperbolehkan perpajakan tetapi disisi lain tidak diinginkan pembuatan undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak merupakan sesuatu yang dilematis bagi pemerintah, disatu sisi diperbolehkan sepanjang masih dalam kerangka perpajakan dan disatu sisi praktik ini merupakan hal yang dapat mengurangi penerimaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar (Ayuningtyas & Sujana, 2018). *Tax avoidance* merupakan upaya untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dan aman bagi wajib pajak, tetapi tindakan ini dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan antara lain sanksi, denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Akibat dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini menimbulkan kurangnya pemasukan yang diterima oleh Negara dan hal ini akan memberikan dampak secara nasional yang akan menghambat pertumbuhan Negara yang diakibatkan berkurangnya pemasukan negara dari sektor pajak.

Ada dua motif perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak ini adalah sebagai berikut: Pertama, upaya memperbesar keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham, dan pelaksanaannya dilakukan oleh manajer. Praktek penghindaran pajak membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik untuk tujuan keuangan jangka pendek yang kemungkinan akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang. *Corporate governance* berperan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalahan agensi dalam praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) salah satunya dapat diminimalisir melalui kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen, (Yuniarti, Sherly & Sari 2020). Nilai perusahaan merupakan suatu indikator keberhasilan kinerja suatu perusahaan dalam mencapai penghargaan dari lingkungan bisnis yang bertujuan menciptakan kekayaan bagi perusahaan atau memaksimalkan laba, agar tujuan perusahaan tercapai memerlukan pengendalian manajemen, salah satu cara yaitu melakukan penghindaran pajak (Soerzawa, Yusmaniarti, Suhendra 2018). Maka dari itu jika perusahaan memiliki mekanisme *good corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan jika suatu perusahaan memiliki mekanisme *good corporate governance* yang buruk di suatu perusahaan akan cenderung melakukan praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Kedua, tindak penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa lepas dari adanya *Theory of Planned Behavior*, teori ini menjelaskan tentang kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan yang sebelumnya telah direncanakan secara sengaja. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu melakukan tindakan tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan karena dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh. Terkait dengan penghindaran pajak pernah terjadi di Indonesia melibatkan salah satu perusahaan tambang batu bara milik Bakrie Grup yaitu PT Kaltim Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin pada tahun 2007. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menduga bahwa praktik penggelapan pajak yang dilakukan ketiga perusahaan menyebabkan selisih pajak lebih rendah senilai US \$477 juta. Adapun selisih royalty atas batu bara (BPHB) yang mencapai US \$143 juta sehingga diakumulasikan ada senilai US \$1,680 miliar kerugian yang ditanggung pemerintah (Mei, 2010) (Ervina & Wulandari, 2019). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2016 terdapat 2000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terindikasi menggunakan

modus *special purpose vehicle* (SPV) untuk menghindari pajak. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwiwijugasteady saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan bahwa PMA yang dilaporkan terdiri dari beberapa jenis sektor usaha antara lain sektor kimia dan perdagangan yang tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25-29 selama 10 tahun karena alasan merugi (www.pemeriksaanpajak.com).

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *good corporate governance* untuk meminimalisasi resiko bisnis yang terjadi. *Good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. *Good corporate governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik buruknya tata kelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. *Good corporate governance* adalah mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer. Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal yaitu struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur bisnis multidivisi, dan mekanisme eksternal yaitu pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal (Ariawan & Setiawan, 2017). Peran *corporate governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan mempunyai kinerja yang baik dan efisien. Dengan diterapkannya *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para stakeholder. Selain itu juga penerapan *corporate governance* juga bertujuan untuk meminimumkan masalah keagenan (Diantari & Ulupui, 2016).

Pada Penelitian ini lebih menekankan pada dua proksi yang terdapat pada *good corporate governance* yang diklasifikasikan pada mekanisme internal (dewan komisaris independen) dan mekanisme eksternal (kepemilikan institusional) serta Profitabilitas. Ada beberapa alat ukur untuk mengetahui tingkat penghindaran pajak salah satunya dengan *Cash ETR* (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Yuniarti, Sherly, & Sari 2020). Selain mengurangi biaya pajak manajemen juga dapat melakukan manajemen keuangan dengan melakukan kebijakan hutang atau struktur modal (*leverage*) untuk meningkatkan nilai perusahaan dimasa mendatang. (Yusmaniarti & Oktaria, 2019)

Dewan Komisaris Independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan pemilik perusahaan. Jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris independen yang diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP – 315/BEJ/06 – 2000 (Ariawan & Setiawan, 2017). Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dari nilai perusahaan. Selain itu komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance*. Penelitian terdahulu Komisaris independen dinyatakan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada penelitian Ariawan & Setiawan (2017), penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2018) menyatakan bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Tetapi penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Yuniarti, Sherly & Sari (2020), Ervina & Wulandari (2019) yang dinyatakan berpengaruh signifikan (positif) terhadap *tax avoidance*. Dan didukung dengan Penelitian yang dilakukan di luar negeri oleh Armstrong et al (2015) mengindikasikan bahwa *corporate governance* dengan proksi dewan komisaris independen memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan saham yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen (Diantari & Ulupui, 2016). Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, maka akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariawan & Setiawan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Penelitian ini sejalan dengan penelitian, Husna & Fajriana (2018), Armstrong et al (2015) dan Yuniarti et al (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan istitusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian dari Diantari &

Ulupui (2016) dan Fitria (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) untuk wajib pajak badan (Ervina & Wulandari, 2019). ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Profit yang tinggi akan mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena jika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan juga meningkat. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* (Ayuningtyas & Sujana, 2018). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husna & Fajriana (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariawan & Setiawan (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian ini didukung oleh penelitian Ayuningtyas & Sujana (2018).

Adanya perbedaan dan kesenjangan hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu (*research gap*) yang tidak konsisten (berbeda), maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Periode tahun yang digunakan yaitu tiga tahun pengamatan (2017-2019).

Berdasarkan latar belakang masalah dan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (dengan variabel dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional) Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (periode 2017-2019). (2) Untuk menganalisis Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Pertambangan di Bursa efek Indonesia (periode 2017-2019). (3) Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) pada Perusahaan Tambang kedepannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency theory

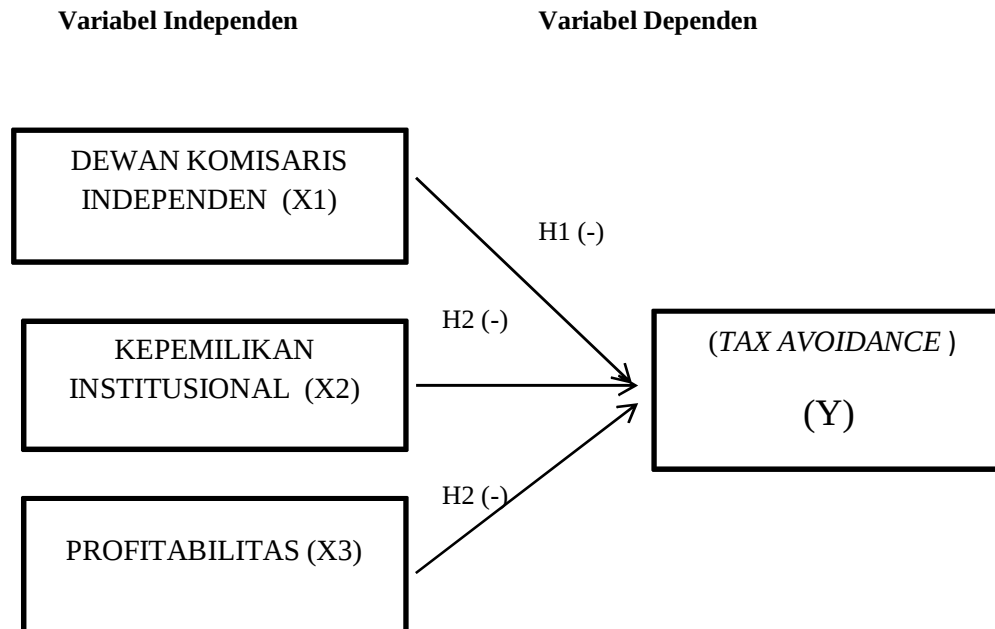
Agency theory atau teori agensi adalah teori yang mendeskripsikan hubungan antara pihak prinsipal yaitu para pemegang saham dengan pihak agen yaitu manajemen dalam perusahaan sehingga terdapat pemisahan kepemilikan. Jensen & Meckling (1976) dalam Yuniarti et al (2020) mengemukakan definisi *agency theory* adalah sebagai berikut: “Hubungan keagenan muncul pada saat satu atau lebih pemilik perusahaan mempekerjakan manajer perusahaan yang bertujuan untuk memberikan jasa dan memberikan kekuasaan kepada agen tersebut untuk membuat suatu keputusan atas nama principal tersebut”. Dalam kegiatan usahanya pemilik perusahaan memberikan wewenang atau tanggung jawab kepada pihak manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk mensejahterahkan pemilik perusahaan baik dalam rentang waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

Manajer perusahaan merupakan pengelola dari suatu perusahaan yang lebih mengetahui tentang informasi internal bahkan prospek perusahaan tersebut pada masa yang akan datang jika dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini dapat menjelaskan bahwa manajemen tidak bisa terlepas dari tindakan penghindaran pajak. Manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak karena ingin memaksimalkan laba perusahaan untuk mengimbangi keinginan dari pemilik perusahaan yaitu menghasilkan laba yang sebesar – besarnya. Selain itu agar kinerja manajemen dapat dinilai baik dan meningkat dari tahun ke tahun.

Theory of Planned Behavior

Tindak penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa lepas dari adanya *Theory of Planned Behavior*, teori ini menjelaskan tentang kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan yang sebelumnya telah direncanakan secara sengaja. (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku individu melakukan tindakan tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan karena dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh. Sebelum individu melakukan hal tersebut, individu akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan

diperoleh atas perilaku yang telah diperbuatnya. Kemudian mereka akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, karena keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara. Menurut Tryana A M Tiraada (2013) munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu : (1) *Behavioral Beliefs*. (2) *Normative Beliefs*. (3) *Control Beliefs*.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah Variabel Dependen merupakan variabel yang terikat dan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan usaha pengurangan bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara legal atau tidak melanggar undang-undang yang ada dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan di suatu Negara. Variabel ini diukur dengan model estimasi *Cash ETR* (*Cash Effective Tax Rate*) atau Tarif Pajak Efektif yang diharapkan mampu mengetahui dan menggambarkan aktivitas penghindaran pajak dalam perusahaan yang dilakukan manajemen perusahaan. Tarif Pajak Efektif dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan Yuniarti, Sherly & Sari (2020). Yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Cash\ ETR = \frac{Curren\ Tax\ Paid}{Pre-Tax\ Income} \quad (1)$$

Keterangan :

CETR = Cash Effective Tax Rate

Curren Tax Paid = Beban pajak

Pre-Tax Income = Laba sebelum pajak

Tarif Pajak Efektif digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal. Semakin besar *Cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang diprokyesikan mempengaruhi variabel lain (variabel dependen). Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa variabel independen antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali (Saputra, Rifa, & Rahmawati, 2015). Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam jajaran dewan komisaris perusahaan (Yuniarti, Sherly & Sari, 2020). Dewan Komisaris Independen diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Dewan Komisaris} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}} \quad (2)$$

Keterangan :

Proporsi Dewan Komisaris = Proporsi Dewan Komisaris Independen
 Jumlah Komisaris Independen = Total Komisaris Independen
 Total Komisaris = Total Dewan Komisaris Perusahaan

2. Kepemilikan Institusional

Menurut Elsiana Ruddian (2017) kepemilikan institusional sebagai pengawas yang berasal dari luar perusahaan memegang peranan penting dalam memonitoring manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Indikator yang digunakan dalam mengukur suatu kepemilikan institusional adalah dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar (Yuniarti, Sherly & Sari, (2020). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Kepemilikan saham institusioal}}{\text{Total saham beredar}} \quad (3)$$

Keterangan :

Kepemilikan Institusional = Kepemilikan saham dalam perusahaan
 Kepemilikan Saham Institusional = Saham yang dimiliki oleh institusi
 Total Saham Beredar = Jumlah modal saham yang beredar

3. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba diukur dengan menggunakan rasio ROA (Ariawan & Setiawan, 2017). ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Rugi Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total aset}} \times 100 \% \quad (4)$$

Keterangan :

ROA = Return On Asset
 Laba Rugi Bersih Setelah Pajak = Laba rugi/bersih setelah pajak perusahaan
 Total Aset = Jumlah seluruh aset perusahaan

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Bursa Efek Indonesia tahun 2021 melalui website BEI (www.idx.co.id). Agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu penelitian dilakukan pada laporan keuangan perusahaan Pertambangan periode 2017-2019. Waktu penelitian dilakukan semenjak di keluarkannya surat dari pihak institusi selama tahun 2021.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2013), penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaedah-kaedah ilmiah yaitu, konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka- angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan objek penelitian ini yaitu, data sekunder yang diperoleh dari perusahaan baik melalui situs, social media, koran, catatan atau laporan yang artinya diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada kurun waktu 2017-2019 dan telah dipublikasikan. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui website BEI (www.idx.co.id).

Populasi dan Sampel

Populasi (*population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang ingin peneliti investigasi. Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik di mana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistik sampel) (Sekaran, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 sebanyak 48 perusahaan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sekaran, 2011). Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang menyajikan laporan keuangan tahunan periode 2017-2019. Dalam pemilihan sampel di penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan cara menentukan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menjadi sampel. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut : (1). Perusahaan adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. (2). Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dengan pelaporan keuangan diterbitkan per 31 Desember, selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. (3). Tidak mengalami kerugian pada 2017-2019, karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak melakukan penghindaran pajak. (4). Perusahaan pertambangan yang memiliki semua data yang diperlukan untuk variabel-variabel penelitian.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka perusahaan yang digunakan adalah Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019 yang berjumlah 18 perusahaan sebagai sampel yang dapat digunakan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yang tersedia dan data yang dipublikasi untuk melengkapi data yang diperlukan selama proses penelitian. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data sekunder seperti laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*) pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id . Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data dari literature seperti buku, artikel, jurnal maupun media cetak lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan perusahaan yang telah melaporkan laporan keuangan dari periode tahun 2017-2019 di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Dimana uji statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui secara detail penelitian atas data-data yang digunakan dalam penelitian ini, baik jumlah data, rata-rata, nilai terbesar dan terkecil. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi mengenai data dari variabel-variabel yang akan diteliti.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Model regresi dapat dikatakan baik apabila model regresi yang memiliki nilai residual yang mengikuti berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 21 dan menggunakan alat uji *One Sample Kolomogorov-Smirnov*. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar daripada 0,05 maka data terdistribusi secara normal. (2) Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih kecil daripada 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara residual (anggota) pada serangkaian observasi tertentu dalam suatu periode tertentu. Penelitian ini menggunakan alat uji autokorelasi yaitu uji *Durbin-Watson* (Uji DW). Model yang bebas autokorelasi adalah model yang nilai *dW*-nya lebih besar dari *dU* dan nilai *dW*-nya lebih kecil dari $4-dU$ dengan kata lain $dU < dW < 4-dU$ (Ghozali, 2013). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi pada suatu model diperlihatkan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d1$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d1 \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-d1 \leq d \leq 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du \leq d \leq 4-d1$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Sumber : (Ghozali, 2013)

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi anantara variabel bebas (independen) (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya antara variabel bebas tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria sebagai berikut: (1) Jika nilai *tolerance* > 1 dan nilai VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka terjadi masalah multikolonieritas. Hal ini berarti model regresi dapat dikatakan tidak baik. (2) Jika nilai *tolerance* < 1 dan nilai VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi masalah multikolonieritas. Hal ini berarti model regresi dapat dikatakan baik.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2013). Jika varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedasitisitas, sedangkan jika berbeda maka disebut heteroskedasitisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser* yang dapat dilakukan dengan meregres nilai absolut residual (AbsUt) terhadap variabel independen (Ghozali, 2013) dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah 1.) Jika nilai koefisien korelasi $>0,05$ maka model regresi tidak terdapat heterokedastisitas; 2.) Jika nilai koefisien korelasi $<0,05$ maka model regresi terdapat heteroskedastisitas.

Analisis Regresi

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. Secara umum analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier (Ghozali, 2013). Analisis regresi berganda adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh dari dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat (Ghozali, 2013). Penelitian ini dihitung dengan menggunakan model regresi linear berganda sebagai berikut. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak), dan variabel independen adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan profitabilitas. Penelitian ini dihitung dengan menggunakan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan antara nilai F-tabel dengan F-hitung hasil run regresi yang dilakukan. Jika nilai F-tabel $<$ F-hitung maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikansi pada model penelitian $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ghozali, 2013).

Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji statistik T digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji T dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-tabel dengan t-hitung. Jika t-tabel $<$ t-hitung maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dan apabila nilai probabilitas signifikansi p-value $< 0,05$ maka suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ghozali, 2013).

Koefisien Determinasi

Menurut Nurhasanah (2016) Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*, sampel penelitian yang terpilih yaitu berjumlah 18 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 54 observasi. Sampel yang telah dipilih selanjutnya digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Distribusi sampel dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi sampel penelitian

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Perusahaan adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.	48
Perusahaan pertambangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan dengan pelaporan keuangan diterbitkan per 31 Desember, selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.	(2)
Perusahaan yang mengalami kerugian pada 2017-2019, karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak melakukan penghindaran pajak	(8)

Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki semua data yang diperlukan untuk variabel-variabel penelitian	(20)
Jumlah sampel penelitian	18
Total sampel penelitian	54

Sumber: Data Olahan

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran tentang suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *tax avoidance*, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan profitabilitas uji statistik deskriptif variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel.3 dibawah ini:

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CASH ETR	54	.0583	.7443	.317983	.1225378
DKI	54	.2500	.6667	.393415	.0906433
SAHAM INSTISUSIONAL	54	.1747	.9700	.605020	.2300576
ROA	54	.0041	.4556	.118715	.1071545
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data Olahan

Pada tabel 3 terlihat bahwa nilai rata-rata dari indikator *tax avoidance* yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* adalah sebesar 0.3179. Standar deviasi yang dimiliki oleh indikator *cash effective tax rate* adalah sebesar 0.1225 jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya, maka nilai standar deviasi dari indikator *tax avoidance* yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* lebih kecil dari pada nilai rata-ratanya hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nilai dari indikator *tax avoidance* yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* tidak bervariasi. Nilai maksimum dari indikator *tax avoidance* yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* pada penelitian ini yaitu sebesar 0.7443 yaitu pada PT. Darma Henwa Tbk hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini yang paling sedikit melakukan penghindaran pajak karena semakin besar nilai rasio *cash ETR* yang dihasilkan mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Nilai minimum dari indikator *tax avoidance* yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* pada penelitian ini yaitu sebesar 0.0583 pada PT. Darma Henwa Tbk hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini yang paling banyak melakukan penghindaran pajak karena semakin besar nilai rasio *cash ETR* yang dihasilkan mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Pada tabel 3 terlihat bahwa nilai rata-rata dari indikator dewan komisaris independen adalah sebesar 0.3934, yang artinya rata-rata perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini menempatkan 39,34% dari keseluruhan dewan komisaris merupakan dewan komisaris independen yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan. Standar deviasi yang dimiliki oleh indikator dewan komisaris independen adalah 0.0906 jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya maka nilai standar deviasi dari indikator dewan komisaris independen lebih kecil dari pada nilai rata-ratanya hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nilai dari indikator dewan komisaris independen tidak bervariasi. Nilai maksimum dari indikator dewan komisaris independen pada penelitian ini yaitu sebesar 0.6667, ini menunjukkan sebesar 66,67% dari jumlah dewan komisaris merupakan dewan komisaris independen yaitu pada PT. Delta Dunia Makmur Tbk yang menempatkan 4 orang dewan komisaris independen dari 6 orang jumlah jajaran dewan komisaris yang ada dan PT TBS Energi Utama Tbk yang menempatkan 2 orang dewan komisaris independen dari 3 orang jumlah jajaran dewan komisaris yang ada. Nilai minimum dari indikator dewan komisaris independen pada penelitian ini yaitu sebesar 0.2500, ini menunjukkan hanya sebesar 25% dari jumlah dewan komisaris merupakan dewan komisaris independen yang terdapat pada PT. Adaro Energy Tbk yang hanya menempatkan 1 orang dewan komisaris independen dari 4 orang jumlah jajaran dewan komisaris yang ada.

Pada tabel 3 terlihat bahwa nilai rata-rata dari indikator kepemilikan institusi adalah 0.6050 ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki kepemilikan institusi sebesar 60,50% dari semua saham yang beredar. Standar deviasi yang dimiliki oleh indikator kepemilikan institusi adalah 0.2300 jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya maka nilai standar deviasi dari indikator kepemilikan institusi lebih kecil dari pada nilai rata-ratanya hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nilai dari indikator kepemilikan institusi tidak bervariasi. Nilai maksimum dari indikator kepemilikan institusi pada penelitian ini yaitu sebesar 0.9700 yang artinya 97% dari semua saham yang beredar dimiliki oleh institusi yaitu pada PT. Golden Energy Mines Tbk, yang mana jumlah saham yang beredar adalah 5.882.353.000 lembar saham. Sebanyak 3.941.166.500 lembar saham atau setara dengan 67% dari saham yang beredar dimiliki oleh Golden Energy and Resources Limited Singapore, sebanyak 1.764.706.000 lembar saham atau setara 30% dimiliki oleh GMR Coal Resources Pte. Ltd., Singapore dan sebanyak 10.000 lembar atau kurang dari 1%. Nilai minimum dari indikator kepemilikan institusi pada penelitian ini sebesar 0.1747 yang artinya hanya ada 17,47% dari semua saham beredar yang dimiliki oleh institusi yaitu pada PT. Kapuas Prima Coal Tbk, yang mana jumlah saham yang beredar adalah 25.250.000.000 dan sebanyak 4,411,795,945 atau setara dengan 17,47% dimiliki oleh PT Sarana Inti Selaras.

Pada tabel 3 terlihat bahwa nilai rata-rata dari indikator profitabilitas yang diproksikan dengan ROA adalah 0.1187 hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini menghasilkan laba 11,87% dari total aset yang dimilikinya. Standar deviasi yang dimiliki oleh indikator profitabilitas yang diproksikan dengan ROA adalah sebesar 0.1071, jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya maka nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-ratanya hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nilai dari indikator profitabilitas yang diproksikan dengan ROA tidak bervariasi. Nilai maksimum dari indikator profitabilitas yang diproksikan dengan ROA pada penelitian ini yaitu sebesar 0.4556 yang artinya perusahaan yang memperoleh profitabilitas tertinggi dari aset yang dimilikinya yaitu pada PT. Bayan Resources Tbk yang memiliki profit sebesar \$524,309,273 atau setara dengan 45,56% dari aset total aset \$1,150,863,891 yang dimilikinya. Nilai minimum dari indikator profitabilitas yang diproksikan dengan ROA pada penelitian ini yaitu sebesar 0.0041 yang artinya perusahaan yang memperoleh profitabilitas terendah dari aset yang dimilikinya yaitu pada PT Resource Alam Indonesia Tbk. yang memiliki profit sebesar \$475,600 atau setara dengan 0,41% dari aset total aset \$117,265,221 yang dimilikinya.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11320816
Most Extreme Differences	Absolute	.162
	Positive	.162
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		1.188
Asymp. Sig. (2-tailed)		.119
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 4 diatas diperoleh nilai Asymp. Sig. (2- tailed) sebesar 0,119. Dikarenakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,119 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 maka data terdistribusi normal. Dengan demikian Uji Normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolenieritas

Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.324	.086		3.772	.000		
DKI	.189	.187	.139	1.008	.318	.892	1.121
SAHAM INSTISUSIONAL	-.073	.073	-.137	-.995	.324	.899	1.112
ROA	-.301	.164	-.263	-1.831	.073	.826	1.210

a. Dependent Variable: CASH ETR

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa tidak terdapat model persamaan yang terkena masalah multikolonieritas. Variabel DKI (Dewan Komisaris Independen) memiliki nilai VIF sebesar 1,121 nilai tersebut diantara 1-10 dan nilai *tolerance* sebesar 0,892 nilai tersebut < 1 , jadi variabel DKI (Dewan Komisaris Independen) terbebas dari masalah multikolinieritas, variabel Kepemilikan Institusi memiliki nilai VIF sebesar 1,112 nilai tersebut diantara 1-10 dan nilai *tolerance* sebesar 0,899 nilai tersebut < 1 , jadi Kepemilikan Institusi terbebas dari masalah multikolinieritas. Variabel Profitabilitas yang di proksikan dengan ROA memiliki nilai VIF sebesar 1,210 nilai tersebut diantara 1-10 dan nilai *tolerance* sebesar 0,826 nilai tersebut < 1 , jadi variabel profitabilitas yang di proksikan dengan ROA terbebas dari masalah multikolinieritas. Dengan demikian maka tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi, atau dengan kata lain ketiga variabel bebas tersebut saling independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1(Constant)	.208	.058		3.575	.001
DKI	-.166	.127	-.182	-1.308	.197
SAHAM INSTISUSIONAL	-.073	.050	-.204	-1.475	.147
ROA	-.184	.111	-.238	-1.649	.105

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 6 hasil regresi antara variabel independen dengan absolut residualnya menunjukkan bahwa koefisien dari masing-masing variabel independen nilai koefisien korelasi taraf signifikansi > 0,05. Sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.383 ^a	.146	.095	.1165549	1.870

a. Predictors: (Constant), ROA, SAHAM INSTITUSIONAL, DKI

b. Dependent Variable: CASH ETR

Sumber: Data Olahan

Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai 1,870, dU adalah sebesar 1,6800 dan dL sebesar 1.4464 (hasil dU dan dL dari tabel Durbin-Watson) nilai 4- dU sebesar 2,320 dan nilai 4-dL sebesar 2,5536. Dengan demikian, $dU \leq d \leq 4-dU$ dimana $1,680 \leq 1,870 \leq 2,320$. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	.324	.086		3.772	.000
DKI	.189	.187	.139	1.008	.318
SAHAM INSTITUSIONAL	-.073	.073	-.137	-.995	.324
ROA	-.301	.164	-.263	-1.831	.073

a. Dependent Variable: CASH ETR

Sumber: Data Olahan

Dari output di atas diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,324 + 0,189X_1 - 0,073X_2 - 0,301X_3$$

Nilai koefisien konstanta (α) sebesar 0,324 dengan nilai positif, tanda positif pada koefisien konstanta ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada variabel independen akan mengakibatkan peningkatan pada variabel dependen begitu juga sebaliknya. Maka dapat diartikan bahwa, $\alpha = 0,324$ Artinya jika variabel Dewan Komisaris Indepen (X_1), Kepemilikan Institusional (X_2) dan profitabilitas (X_3), bernilai konstan (bernilai 0) maka variabel *Tax Avoidance* (Y) akan bertambah 0,324 satuan. Variabel dewan komisaris independen (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,189 nilai koefisien positif. Hal ini menggambarkan jika setiap kenaikan proporsi dewan komisaris independen sebesar 1 kali maka meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 0,189 dengan asumsi variabel lain tidak berubah atau tetap. Variabel kepemilikan institusional (X_2) memiliki

koefisien regresi sebesar -0,073 nilai koefisien negatif. Hal ini menggambarkan jika setiap kenaikan kepemilikan institusional sebesar 1 kali maka terjadi penurunan *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0,073 dengan asumsi variabel lain tidak berubah atau tetap. Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (X3) memiliki koefisien regresi sebesar -0,301 nilai koefisien negatif. Hal ini menggambarkan jika setiap kenaikan sebesar 1 kali maka menurunkan *Tax Avoidance* sebesar 0,301 dengan asumsi variabel lain tidak berubah atau tetap.

Pengujian Hipotesis

Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

H0 : Variabel Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Profitabilitas (X3) tidak berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* (Y)

H1 : Variabel Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Profitabilitas (X3) berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* (Y).

Tabel 9. Uji F (F-test)

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.117	3	.039	2.860	.046 ^a
Residual	.679	50	.014		
Total	.796	53			

a. Predictors: (Constant), ROA, SAHAM INSTITUSIONAL, DKI

b. Dependent Variable: CASH ETR

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F hitung = 2,860 dan F tabel = 2.79 nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel dan nilai sig. sebesar 0,046 diketahui nilai sig. yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikan = 0,05. Maka H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama Variabel Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Profitabilitas (X3) berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* (Y).

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 10. Uji T (T-test)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	.324	.086		3.772	.000
DKI	.189	.187	.139	1.008	.318
SAHAM INSTITUSIONAL	-.073	.073	-.137	-.995	.324
ROA	-.301	.164	-.263	-1.831	.073

a. Dependent Variable: CASH ETR

Sumber: Data Olahan

Koefisien Determinasi (R²)**Tabel 11. Koefisien Determinasi**

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.383 ^a	.146	.095	.1165549

a. Predictors: (Constant), ROA, SAHAM INSTISUSIONAL, DKI

b. Dependent Variable: CASH ETR

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil uji SPSS 16 diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) 0,146 yang mana KD = $r^2 \times 100\%$ atau KD = $0,146 \times 100\% = 14,6\%$. Dengan demikian, maka diperoleh nilai KD sebesar 14,6%. yang menunjukkan arti bahwa variabel Dewan Komisaris Independen (X1), Kepemilikan Institusional (X2), dan Profitabilitas (X3) memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 14,6% terhadap *Tax Avoidance* (Y). dan sisanya 85,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Pembahasan**Hipotesis 1**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menandai bahwa keberadaan dewan komisaris independen belum mampu untuk mencegah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak hal ini diduga karena keberadaan komisaris independen hanya masih dianggap sebagai formalitas atau tuntutan untuk mematuhi peraturan yang ada saja belum mampu bertindak secara efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya, jika dilihat dari data statistik deskriptif nilai rata-rata variabel dewan komisaris independen adalah 0,3934 atau 39,34% yang artinya sudah terpenuhinya aturan yang ditetapkan Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2014) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam hal dewan komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Secara rata-rata aturan tersebut telah terpenuhinya namun keberadaan komisaris independen ini tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam melakukan penghindaran pajak, karena diduga terbatasnya pengawasan dan jumlah yang masih sedikit dibandingkan dengan pihak-pihak terafiliasi lainnya yang mendominasi keputusan dan pengawasan dalam perusahaan sehingga mampu untuk mengendalikan komisaris independen yang menyebabkan kemampuan Komisaris Independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi menjadi terbatas.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani (2017) yang hasilnya Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance* diduga hal tersebut terjadi karena tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Didukung dengan penelitian Afriyanti et al (2019) variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, fungsi komisaris independen sebagai pengawas dan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris tidak memberikan dampak yang berarti terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Hipotesis 2

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena memang pada dasarnya institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan yang merupakan pemilik dari suatu perusahaan namun pemilik institusi tidak terlibat langsung dalam menjalankan perusahaan, pemilik institusional mempercayakan pengelolaan dan pengawasan perusahaannya kepada jajaran manajemen perusahaan dewan direksi dan komisaris dalam

pengelolaan perusahaan karena itu merupakan tugas mereka. dan pemilik institusional lebih mementingkan keuntungan bagi mereka sendiri sehingga apabila penghindaran pajak bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan maka itu dianggap baik, karena pemilik perusahaan pasti ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari perusahaan yang dimilikinya. sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* bisa terjadi. (IBRAHIM et al., 2020)

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani (2017) bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* lebih lanjut dalam penelitiannya mengatakan pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi dan pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan itu bisa memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun adanya perilaku manajer dalam hal mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu tindakan *tax avoidance*. Didukung oleh penelitian Windarni et al (2018) bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lebihnya lanjut dalam hasil penelitiannya menyatakan kepemilikan institusional cenderung hanya berpikir memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri sehingga dapat merugikan perusahaan.

Hipotesis 3

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dapat dikatakan bahwa besar atau kecilnya profit dari perusahaan bukan tolak ukur untuk melakukan *tax avoidance* karena tindakan *tax avoidance* berkaitan dengan karakter dari pengambil keputusan dalam hal ini manajemen perusahaan, manajemen selalu ingin mencapai laba yang sebesar-besarnya dalam pengelolaan perusahaan, sehingga manajemen akan mempertimbangkan dan tidak menginginkan hal yang akan menyebabkan arus kas keluar bagi perusahaan dan menyebabkan penurunan laba bagi perusahaan, terlepas apakah laba yang telah dihasilkan itu besar ataupun kecil.

Selanjut dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Marfu'ah, (2015) diketahui bahwa *return on assets* (profitabilitas) tidak berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. ROA merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga ROA merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan. Demikian tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan. Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan *tax subsidy* berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah.

Didukung oleh penelitian Putri (2018) bahwa variabel ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap upaya perusahaan melakukan *tax avoidance*. Terbukti dengan adanya data atau dengan pergerakan grafik yang menggambarkan tidak adanya hubungan timbal balik antara profitabilitas dengan upaya perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan dengan penghasilan laba yang besar atau dengan laba yang kecil keduanya memiliki persamaan untuk melakukan perencanaan pajak untuk melakukan penghematan aliran kas keluar pada perusahaannya.

PENUTUP

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan dan analisis data dengan bantuan alat SPSS 21, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam jajaran dewan komisaris perusahaan. (2) dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. (3) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan rasio profitabilitas (ROA).

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi perusahaan di Bursa Efek Indonesia hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tingkat pengaruh penerapan Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat dijadikan evaluasi dan referensi perbaikan

perusahaan yang akan datang dengan melihat variabel yang digunakan peneliti. (2) Bagi para investor dan calon investor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar lebih seksama dan juga memperhatikan aspek GCG (dari Proksi Kepemilikan Institusional & Dewan Komisaris Independen) dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi. (3) Sebagai masukan bagi para akademisi untuk menjelaskan pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang berimplikasi meningkatnya reputasi perusahaan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, serta tentunya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya.

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang diantaranya: (1) Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan pada periode 2017-2019 banyak yang tidak memenuhi kriteria, jumlah sampel hanya 18 perusahaan dalam setiap tahun. (2) Terbatasnya data yang diperlukan untuk variabel-variabel penelitian pada perusahaan pertambangan karena sebagian perusahaan tidak mengungkapkan proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional. (Yusmaniarti, Yusmaniarti, 2020)

Beberapa saran dari penelitian ini antara lain: (1) Bagi perusahaan, *tax avoidance* merupakan tindakan yang harus dipertimbangkan dengan matang oleh perusahaan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan tersebut. Terlepas apakah faktor-faktor lain diluar penelitian ini mempengaruhinya atau tidak. jika *tax avoidance* dilakukan dengan cara yang tidak tepat dan tanpa pertimbangan bisa menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah bahkan bisa kepada perusahaan itu sendiri. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian serta memperluas objek penelitian tidak hanya pada perusahaan pertambangan saja, menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak sehingga model yang dihasilkan akan jauh lebih baik, menambah sumber referensi yang lebih baik, sampel yang lebih banyak serta memperpanjang periode waktu penelitian (time series).

DAFTAR RUJUKAN

- Afriyanti, S. A., Sugiarti, & Hariyanti, W. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 1–13.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. In *Organizational Behavior and Human Decision Processes* (Vol. 211, pp. 179–211).
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 1884–1912. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p10>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Ervina, D., & Wulandari, T. R. (2019). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal , Profitabilitas , Proporsi Dewan Komisaris Independen , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mutiara Madani*, 07(1), 23–39.
- Fitria, G. N. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif Dan Size Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 94–104.
- Ghozali, I. (2013). Ghozali, Imam (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, R. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(3), 114–131.
- Husna, N., & Fajriana, I. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional,

- Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurusan Akuntansi, STIE MDP, Palembang*, 1, 1–11.
- IBRAHIM, A., ZURRIYATI, R., UTAMI, M. A., OCTARIA, S. L., WAHYUNI, T., SIADNYANI, L., & YUSMANIARTI, Y. (2020). *Implementation of Social Customer Relationship Management Using Instagram and Facebook as Songket Marketing Media*. 172(Siconian 2019), 554–560. <https://doi.org/10.2991/aisr.k.200424.085>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 3, 305–360.
- Marfu'ah, L. (2015). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- OJK. *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*. , (2014).
- Putri, G. L. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, ROA Dan DER Terhadap Tax Avoidance Pendekatan Operating Cash Flow Industri Perbankan Di ASEAN. *Artikel Ilmiah, Kolaborasi Riset Dosen Dan Mahasiswa*.
- Ruddian, E. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung, 2015*.
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12.
- Sekaran, U. (2011). Data Primer & Sekunder. In *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*.
- Soerzawa, D., Yusmaniarti, & Suhendra, C. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Leverage sebagai Variabel Moderasi. *BILANCIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(4), 367–377.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2014) h.64. (2013). Buku - Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999–1008.
- Windarni, N., Nurlaela, S., & Suhendro. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan 2018*, 719–737.
- Yuniarti, N., Sherly, E. N., & Sari, D. N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(1), 97–109. <https://doi.org/10.36085/jakta.v1i1.827>
- Yusmaniarti, Yusmaniarti, A. B. (2020). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance , Independensi Auditor Dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 50–67.
- Yusmaniarti, Y., & Oktaria, S. (2019). PENGARUH EARNING PER SHARE, OPERATING CASH FLOW, ECONOMIC VALUE ADDED (EVA), DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2015). *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 124–136.